PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN PROGRAM DINAS DI DINAS PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

FAISAL MUSLIGHIN

07011281722076

Keuangan Sektor Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM DINAS DI DINAS PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
S-1Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

FAISAL MUSLIGHIN
07011281722076

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2021

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN PROGRAM DINAS DI DINAS PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada tanggal bulan tahun dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
Anggota

Drs. Gatot Budiarto, M.Si
Anggota

Dra. Martina, M.Si
Anggota

Indralaya, November 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Diperlukan suatu poses dalam mencapai perubahan, proses yang baik akan memberikan hasil yang baik"

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orangtua
3. Keluarga Besarku
4. Teman Seperjuangan AP 2017
5. Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perubahan anggaran di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan yang disebabkan oleh penyebaran pandemi covid 19. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan pemerintah harus melakukan *refocusing* anggaran sehingga dinas perkebunan perlu menyusun ulang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang di efisiensikan, maka dari itu penelitian ini dilihat dari proses penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan konsep menurut Anwar yang menyebutkan proses penyusunan anggaran yaitu mengidentifikasi kegiatan, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan, membuat pernyataan finansial, memformulasikan anggaran, menyusun usulan perubahan anggaran, melakukan revisi anggaran usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, dan pengesahan perubahan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini proses penyusunan perubahan anggaran dinas perkebunan dilakukan dengan penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran oleh BAPPEDA lalu penentuan besaran anggaran melalui koordinasi dengan BPKAD untuk membuat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS setelah itu dilakukan persetujuan untuk dibentuk menjadi RKAP SKPD selanjutnya dilakukan penyesuaian dan persetujuan dengan DPRD. Untuk pelaksanaan perubahan anggaran dibentuk menjadi DPPA SKPD sekaligus untuk disetujui dan disahkan oleh kepala dinas dan sekeretaris daerah. Hasil penelitian ini merekomendasikan sebaiknya dilakukan peningkatan penilaian terhadap kesesuaian anggaran dengan kegiatan, agar pelaksanaan anggaran dapat mencapai target 100 persen dan pada penyusunan kegiatan yang akan dilakukan diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat seperti kegiatan bantuan kepada masyarakat guna mencapai peningkatan komoditas perkebunan di Sumatera Selatan.

Kata kunci : Proses Penyusunan Anggaran, Perubahan Anggaran, *Covid-19*

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si
NIP.196511171990031004

Pembimbing II

Drs. Mardianto.M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, November 2021
Ketua Jurusan Ilmu Admnistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Mapaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to determine how the changes in budgeting at the Plantation office of South Sumatera due to the Covid-19 Pandemic. Covid-19 Pandemic leads the government has to rearrange and refocus the budget plan thus Plantation office in South Sumatera has to modify the agenda that will be implemented by streamlined budget plan, Therefore this research is seen from the budget preparation process that is adjusted to the concept according to Anwar who mentions the budget preparation process, namely identifying activities, identifying sources of revenue, making financial statements, formulating budgets, preparing budget changes proposals, revising budget proposals, approving the revision of budget proposals, and ratification of budget changes. The method that was used in this research is qualitative by interview and documentary. The results of this study are the process of preparing changes to the budget plan for the plantation office of south Sumatera by submitting the General Policy on Budget Changes by BAPPEDA and then determining the amount of the budget through coordination with BPKAD to make Provisional Budget Priorities and Ceilings or PPAS after which approval is made to be formed into RKAP SKPD then adjustments and approvals are made with DPRD. implementation changes of a budget plan formed into DPPA SKPD outright approved and legitimated by the head of office and regional secretary. The results of this study recommend increasing the assessment of the suitability of the budget with activities. so that the implementation of the budget is possible to reach the target of 100 percent and in the preparation of the activities to be carried out it is expected that it can prioritize the public needs such as public aid to achieve an increase in plantation commodities in South Sumatra.

Keyword : Budget Preparation Process, Budget Changes, Covid-19

Advisor I

Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si
NIP.196511171990031004

Advisor II

Drs. Mardianto.M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, November 2021
Chairman Of The Department Public Administration
Faculty Of Social and Political Science
University of Sriwijaya

Zailani Surya Mapaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Muslighin

NIM 0 : 07011281722076

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN PROGRAM DINAS DI DINAS PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya 28 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

Faisal Muslighin

07011281722076

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Program Dinas Di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan serta bimbingan sehingga semua hambatan serta kesulitan tersebut dapat terlewati dengan baik Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah S.W.T. atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
2. Kepada Keluarga penulis terutama orang tua penulis Ibu Eti Susanti yang memberikan restu dan dukungan penuh kepada penulis dalam membuat skripsi.
3. Kepada Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos,.M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Kepada Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang membangun kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Drs. Mardianto, M.Si, selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang dengan tulus memberikan arahan, bimbingan, serta masukan-masukan kepada penulis.
7. Kepada H. Fakhrurrozi Rais selaku kepala Dinas Perkebunan SumateraSelatan dan seluruh jajaran di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan.
8. Bapak Alfian, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing Teknis di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan yang telah memberikan bimbingan

teknis dan arahan kepada penulis. .

9. Bapak Dian Eka Putra, S.TP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
10. Ibu Marcellia Nonita, selaku Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang telah banyak memberikan informasi seputar penelitian ini.
11. Kepada Teman-Teman seperjuangan administrasi publik 2017, Pipit, Bagus, Fikri, Indah, tio, yoga, lamria serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi penulis.
12. Kepada teman-teman penulis Farel, Naufal, Alpan, Mutiara, Ranti, Arini, Dismala, Raden yang selalu hadir dan memberikan support serta dukungan dalam pembuatan skripsi penulis.

Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa serta dukungan dalam penulisan Skripsi ini. Penulis meminta maaf apalila masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan 7

D. Manfaat 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Landasan Teori 8

B. Keuangan Daerah 8

C. Anggaran 9

D. Penyusunan Anggaran 12

E. Proses Penyusunan Perubahan Anggaran 14

F. Pandemi Covid 19 19

G. Penelitian Terdahulu 21

H. Kerangka Pemikiran 23

BAB III METODE PENELITIAN **24**

A. Jenis Penelitian 24
B. Definisi Konsep Dan Aspek Penelitian 24
C. Fokus Penelitian 25
D. Unit Analisis Data 27
E. Informan Penelitian 28
F. Jenis Dan Sumber Data..... 28
G. Teknik Pengumpulan Data 29
H. Teknik Analisis Data 29
I. Sistematika Penulisan 30
BAB IV PEMBAHASAN 32
A. Gambaran Umum Dinas Perkebunan Sumatera Selatan 32
B. Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 42
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. SARAN 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1 Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja daerah (RKAP SKPD)..... 5

Tabel 2 Perubahan Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunnan dan Kegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Kopi..... 6

Tabel 3 Penelitian terdahulu..... 21

Tabel 4 Fokus Penelitian 27

Tabel 5 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Pegawai Dinas Perkebunan Sumatera Selatan 2020 41

Daftar Gambar

Gambar 1 Proses Penyusunan Rencana APBD 18

Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan 2020 42

Gambar 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..... 45

Gambar 4 RKAP SKPD Program Produksi dan Produktivitas Perkebunan Dinas Perkebunan tahun 2020 47

Gambar 5 Ringkasan dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran SKPD 50

Gambar 6 Surat Gubernur Sumatera Selatan No.900/-840/BPKAD48..... 52

Gambar 7 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan PKPD Prov.Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020..... 53

Gambar 8 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Belanja 54

Gambar 9 Dokumentasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan SIMDA keuangan 57

Gambar 10 Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah..... 59

Gambar 11 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Disbun Tahun 2020 60

Gambar 12 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 63

Gambar 13 Lembar formulir DPPA SKPD tahun anggaran 2020..... 64

Gambar 14 Dokumen Ringkasan DPPA SKPD 65

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Matrik Wawancara

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan PKPD Prov.Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

Lampiran 5 : Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lampiran 6 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lampiran 7 : Realisasi keuangan dan Fisik APBD T.A 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Lampiran 8 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 9 : Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 10: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19)

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPPA SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DISBUN	: Dinas Perkebunan
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKAP SKPD	: Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan (sumatera.bisnis.com / di rilis tanggal 7 Mei 2018/diakses tanggal 5 Januari 2021) menurut Kepala BPS Sumsel Yos Rusdiansyah serapan lapangan pekerjaan pada bidang pertanian dan Perkebunan pada tahun 2018 sebesar 1,9 juta dengan total serapan sebesar 46,30 %. Sumatera Selatan memiliki beragam produk unggulan dalam bidang perkebunan, menurut data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Sumatera Selatan memiliki luas kawasan budidaya pangan dan hortikultura Perkebunan sebesar 3,8 juta hektar, serta produksi komoditas Perkebunan pada tahun 2018 untuk kelapa sawit 3,8 juta ton, karet 1,08 juta ton, kopi 145 ribu ton. Sumatera Selatan merupakan penghasil kopi terbesar pertama di indonesia, menurut data badan pusat statistik yang dirilis tanggal 4 november 2020 Indonesia memiliki total produksi kopi sebesar 761 ribu ton kopi nasional dan Sumatera Selatan menyumbang total 196 ribu ton kopi.

Untuk terus menunjang peningkatan produksi komoditas hasil perkebunan di Sumatera Selatan diperlukannya pengelolaan dan pengawasan dalam aspek Perkebunan untuk itu Dinas Perkebunan Sumatera Selatan hadir dengan peran dalam pengelolaan dan pengawasan Perkebunan di Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penghasilan daerah dalam aspek Perkebunan dengan peremajaan perkebunan, peningkatan hasil kebun, penyuluhan, serta pengawasan Perkebunan di wilayah Sumatera Selatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 3 (d) menyatakan bahwa “penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar”. Pada tahun anggaran 2018 melalui kepala Dinas Perkebunan dan Gubernur Sumatera Selatan menandatangani penetapan kinerja dimana didalamnya menentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas pembangunan Sumatera Selatan untuk masa yang akan datang diantara kegiatan tersebut yaitu meningkatkan produksi dan pendapatan petani Perkebunan serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk unggulan Perkebunan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rancangan Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Rancangan Kerja Anggaran ditujukan untuk merincikan anggaran pada setiap program agar dapat mencapai tujuan nasional dengan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya sehingga mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga rancangan kerja anggaran

diuraikan menurut jenis belanja, perkiraan untuk tahun berikutnya, serta merupakan sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya wabah virus covid 19 yang merupakan virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan. Kasus terjangkit virus covid 19 pertama kali terjadi di negara China tepatnya di Kota Wuhan Pada bulan November 2019 lalu dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Covid 19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 Hingga 31 Mei 2020, Menurut laman (Kompas.com/1 september 2020) jumlah total pasien positif Covid-19 sampai dengan 31 Mei 2020 di Indonesia mencapai 26.473 orang. Ada pun total pasien yang meninggal dunia di Indonesia akibat Covid-19 adalah sebanyak 1.613 dan pasien sembuh sebanyak 7.308. Untuk menghadapi penyebaran covid 19 yang masif dan cepat yang berdampak buruk terhadap perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020.

Pada ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa “Pemerintah perlu melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud”. Pada Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan

alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan begitu instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran kembali agar anggaran yang digunakan dapat digunakan dengan semaksimal mungkin dan anggaran yang dialihkan dapat digunakan untuk penanganan covid 19 maka instansi atau lembaga pemerintah perlu melakukan perubahan anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 2 ayat (2) Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Pada pasal 3 ayat (1) Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Instruksi presiden No. 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 900/0840/BPKAD/2020 tentang efisiensi belanja langsung dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus (COVID-19), hal ini mengharuskan melakukan perubahan anggaran.

Tabel 1
Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja daerah (RKAP SKPD)

NO	Nama Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.503.887.900	1.995.264.500
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	140.000.000	35.000.000
3	Program Disiplin Aparatur	100.000.000	88.450.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	87.224.000

5	Program Peningkatan Prengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	150.000.000	60.000.000
6	Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman	374.000.000	174.000.000
7	Program Pembenihan Perkebunan	100.000.000	50.000.000
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkebunan	100.000.000	76.250.000
9	Program Proteksi Tanaman Perkebunan	3.666.522.702	118.000.000
10	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2.100.000.000	1.351.473.100
11	Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan / PKUP	61.912.100	23.412.100
	Jumlah	9.396.322.702	4.059.073.700

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja daerah (RKAP SKPD) Dinas Perkebunan Sumatera Selatan tahun 2020

Dikeluarkanya Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 menyebabkan Anggaran Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perkebunan Sumatra Selatan tahun 2020 harus ditiadakan yang menyebabkan sumber dana yang diterima terbatas. Sebagai lembaga instansi pemerintah daerah dibawah kementrian pertanian Dinas Perkebunan Sumatera Selatan juga mengalami perubahan pada anggaran belanja langsung. Pada tabel 1 anggaran belanja langsung pada Dinas Perkebunan Sumatera mengalami pemotongan anggaran sebesar 57 % Dari total anggaran sebelum perubahan sebesar 9.396.322.702 menjadi sebesar 4.059.073.700 setelah perubahan, hal ini menunjukan bahwa terjadi pengurangan nominal anggaran.

Tabel 2

Perubahan Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunnan dan Kegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Kopi

NO	**Program Dan Kegiatan**	**Sebelum Perubahan**	**Setelah Perubahan**

1	**Program Proteksi Tanaman Perkebunan**	**3.666.522.702**	**118.000.000**
1.1	Rehab gedung kantor UPTD balai proteksi tanaman perkebunan	2.460.468.629	0,00
1.2	Rehab laboraturium proteksi UPTD BPTP	674.879.853	0,00
1.3	Pengadaan sarana dan perasarana laboratorium	381.174.220	0,00
1.4	Pengawalan kegiatan Dana Alokasi Khusus	150.000.000	118.000.000
2	**Kegiatan Pengembangan Varietas Kopi**	**200.000.000**	**90.000.000**
2.1	Belanja bahan pakai habis	1.290.000	1.290.000
2.2	Belanja cetak dan penggandaan	839.000	839.000
2.3	Belanja perjalanan dinas	147.870.000	87.870.000
2.4	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.200.000	40.200.000
2.5	Belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga	50.000.000	0,00

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja daerah (RKAP SKPD) Dinas Perkebunan Sumatera Selatan tahun 2020

Pada Kegiatan Bantuan Kepada Masyarakat Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Perkebunan mengalami pemotongan anggaran hingga 100 persen dimana terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 50.000.000 yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan bantuan pada program tersebut, dan pada beberapa kegiatan juga

terjadi pemotongan hingga 100 persen seperti Kegiatan Rehab Gedung Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yang mengalami pengurangan sebesar Rp 2.460.468.702 hingga 0,00, Rehab Laboratorium Produksi UPTD mengalami pengurangan sebesar Rp 674.879.853 hingga Rp 0,00 Serta Pengadaan Sarana Dan Prasarana mengalami pengurangan hingga Rp 381.174.220 hingga Rp 0,00 yang menyebabkan tidak ada pelaksanaan terhadap kegiatan tersebut.

Terjadinya perubahan anggaran berdampak pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, akibatnya terjadi penurunan kualitas dan kuantitas pada pelaksanaanya. Karena itu perlu dilihat dinamika penyusunan anggaran agar diketahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan anggaran. Untuk mengetahui hal tersebut perlu melihat proses penyusunan perubahan rencana anggaran program Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Karena Pandemi Covid19?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perubahan anggaran di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan karena pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat Sebagai bahan kajian dalam studi ilmu administrasi publik terutama dalam bidang pembelajaran penganggaran keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat mengetahui anggaran yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga anggaran tersebut dapat digunakan secara maksimal.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Abdul Halim, Ahmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

_____. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

_____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Miles, M.B & Huberman, A.M.2014 *qualitative and analysis: an expanded source book (2nd ed), CA Sage Thausnd Oaks.*

Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*: Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sumber Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rancangan Kerja Perkebunan

Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sumber Skripsi

Ningsih, Eva Marya. 2011. Analisis Penyusunan Anggaran Penjualan Dan Pengendalian Anggaran Penjualan Pada Pt. Perkebunan Nusantara V N (Persero). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Monalisa, Nanda. 2020. Penerapan Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Dalam Bidang Olahraga Oleh Humas Capital Region Sumbagsel Di Pt. Pertamina (Persero) Refinert Unit III Plaju Palembang Tahun 2019. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya Indralaya.

Sumber Jurnal

Adhi, K. (2019). Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. *Profit*, *13*(01), 47–62. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.6

Basri, Ramlah. (2013) Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 , Hal. 202-212

Eugenio, A.-P., Carmela, B., Cecilia, L., Francesca, M.-R., Alessandro, S., Mariafrancesca, S., & Ileana, S. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *32*(5), 957–965.

Ibrahim, Lilly. 2012. Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyusunan (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Balance, 8(2), 1858-2192

Indrawati, N. (2010). Penyusunan Anggaran dalam Era New Public Management: Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *10*(2), 176–193.

Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado. *Jurnal Risiko*, *5*(2), 1935–1943.

Zahruddin, Arifin Zainul, Suhandi Achmad. 2019. Implementasi Penyususnan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan 26 (1) (2019) 46-56.

Sumber Makalah

Kartiwa, H.A. 2014. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum. Makalah

Sumber Internet

https://www.liputan6.com/global/read/4449154/update-5-januari-2021-856 juta-orang-di-dunia-positif-covid-19-48-juta-pasien-pulih (liputan6.com/dirilis pada 1- oktober 2019/diakses tanggal 5 januari 2021)

https://sumatra.bisnis.com/read/20180507/534/792528/tiga-sektor-ini-jadi-tumpuan-utama-lapangan-kerja-di-sumsel (sumatera.bisnis.com / dirilis tanggal 7 Mei 2018/diakses tanggal 5 Januari 2020.